
PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG UMKM INDUSTRI KUE TRADISIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

Esli Zuraidah Siregar*, Nurharisya Hasibuan, Nurhabnida
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, Indonesia
E-mail: esli@uinsyahada.ac.id

Submit : 25 Maret 2025, Revisi : 25 Oktober 2025, Approve : 01 Desember 2025

Abstract

This study examines the role of the government in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), specifically those engaged in the traditional cake industry, in the city of Padangsidimpun. MSMEs play a crucial role in supporting local economic development and community welfare; however, many face persistent challenges, including limited access to capital, inadequate marketing networks, and low technological capacity. Using a qualitative research design with a descriptive phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving MSME actors and relevant government institutions. The findings reveal that government support is manifested through training programs, capital assistance, and facilitation of market access. Nevertheless, the effectiveness of these initiatives remains constrained by uneven implementation and limited sustainability. This study highlights the importance of strengthening government policies and collaborative strategies to enhance the competitiveness of traditional cake MSMEs and improve community welfare in Padangsidimpun.

Keywords: Government Role, MSMEs, Traditional Cake Industry, Community Welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM industri kue tradisional, di Kota Padangsidimpun. UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM dan instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah diwujudkan melalui program pelatihan, bantuan permodalan, serta fasilitasi akses pemasaran. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih terkendala oleh pelaksanaan yang belum merata dan keberlanjutan program yang terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan sinergi pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM industri kue tradisional serta kesejahteraan masyarakat di Kota Padangsidimpun.

Kata Kunci: Pemerintah, UMKM, Kesejahteraan Masyarakat

Pengutipan: Siregar, E Z., Hasibuan N. & Nurhabnida. 2025. Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM untuk Kesejahteraan Masyarakat Padangsidimpuan. *Jurnal Community Online*, 6(2), 2025, 200-210, doi:10.15408/jko.v6i2. 45580

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di wilayah regional seperti Kota Padangsidimpuan. UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Supriatna et al., 2023). Di Indonesia, UMKM menyumbangkan sebagian besar dari perekonomian nasional, mendorong inovasi, serta menyediakan mata pencaharian bagi jutaan masyarakat (Supriatna et al., 2023). Namun demikian, meskipun memiliki peran vital, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya (Novitasari, 2022). Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan UMKM memperoleh dukungan yang memadai agar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri kue tradisional merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang cukup pesat di Kota Padangsidimpuan. UMKM ini umumnya berbasis rumah tangga dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan bahan baku lokal serta resep tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Produk kue tradisional tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya yang menjadi identitas kuliner daerah.

Namun demikian, kondisi UMKM kue tradisional di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan produksi dengan peralatan sederhana, kapasitas produksi yang terbatas, serta sistem pemasaran yang bersifat konvensional. Selain itu, banyak pelaku UMKM kue belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, maupun sertifikasi halal, sehingga membatasi akses mereka terhadap pasar yang lebih luas, termasuk ritel modern dan platform digital.

Meskipun memiliki potensi besar, UMKM di Padangsidimpuan menghadapi sejumlah hambatan utama, di antaranya keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis, serta rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial (Agustin et al., 2023). Selain itu, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengakses pasar karena keterbatasan jaringan distribusi, biaya logistik yang tinggi, serta

kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Hambatan lain yang muncul adalah regulasi yang rumit, tingginya pajak, dan infrastruktur yang belum optimal, seperti transportasi serta akses terhadap teknologi informasi (Maimuna et al., 2024). Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendorong penguatan UMKM industri kue tradisional melalui kebijakan pemberdayaan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Padangsidempuan.

Peran pemerintah dalam mendukung UMKM menjadi semakin krusial dalam era transformasi digital dan pemulihan ekonomi pasca pandemi (Maimuna et al., 2024). Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan dan program yang mempermudah akses kredit, menyediakan pelatihan bisnis, serta mendorong adopsi digital yang dapat memperkuat daya saing pelaku usaha (Hidayat & Kholik, 2024). Dukungan tersebut harus diikuti dengan penyederhanaan proses regulasi serta penguatan infrastruktur digital agar UMKM dapat beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Semakin meningkatnya peran teknologi dalam pertumbuhan bisnis, integrasi solusi digital dalam operasional UMKM akan membantu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat perekonomian daerah. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional (Nanta et al., 2025).

Untuk memberikan analisis yang komprehensif, penelitian ini merujuk pada literatur yang membahas dukungan pemerintah terhadap UMKM, kebijakan ekonomi, serta studi kasus dari berbagai daerah yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan berbasis komunitas. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis fenomenologis, yang digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi pelaku UMKM di Padangsidempuan terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis (Ruhansih, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri kue tradisional di Kota Padangsidempuan.

Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti menggali realitas sosial berdasarkan pengalaman langsung informan dalam konteks kehidupan dan aktivitas usaha yang mereka jalani (Adlini et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipatif terhadap 10 pelaku UMKM industri kue tradisional yang aktif beroperasi di Kota Padangsidempuan serta 4 informan dari unsur pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi terkait yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan UMKM. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam aktivitas pemberdayaan UMKM.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah, kebijakan terkait UMKM, serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode guna meningkatkan akurasi dan validitas data.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk menafsirkan makna dari setiap temuan lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah dalam penguatan dan pemberdayaan sektor UMKM industri kue tradisional di Kota Padangsidempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM Kue

Peran pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kue sangatlah penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha ini (Siska, 2017). Salah satu bentuk dukungan utama yang diberikan adalah penyediaan akses permodalan (Kharani Putri et al., 2024). Pemerintah menyediakan berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan bunga rendah, bantuan hibah, serta fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan. Dengan adanya bantuan ini, pelaku UMKM kue dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk mereka tanpa harus terbebani oleh kesulitan finansial yang berlebihan.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pelaku UMKM kue. Berbagai pelatihan dan workshop sering diselenggarakan untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang manajemen bisnis, inovasi produk, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital (Kharani Putri et al., 2024). Dengan adanya program ini, pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar, sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan yang semakin ketat (Adda et al., 2024).

Dukungan lain yang diberikan pemerintah adalah fasilitasi akses pasar bagi UMKM kue. Untuk membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar mereka, pemerintah mengadakan berbagai kegiatan seperti bazar dan pameran produk, serta mendorong promosi melalui platform digital (Journal et al., 2025). Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan ritel modern agar produk-produk UMKM dapat lebih mudah didistribusikan. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, UMKM kue dapat meningkatkan omzet dan memperluas jaringan pemasaran.

Kemudahan regulasi dan legalitas juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM kue (Hidayah & Airawaty, 2023). Pemerintah menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan sertifikasi produk, seperti izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal. Dengan proses yang lebih mudah dan cepat, pelaku usaha dapat segera mengurus legalitas bisnis mereka sehingga dapat memasarkan produk secara lebih luas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Langkah ini sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun internasional (Dewi, 2021).

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan teknologi dalam bisnis UMKM kue. Program pelatihan e-commerce, pemasaran digital, serta penggunaan teknologi produksi yang lebih efisien menjadi bagian dari upaya untuk mempermudah digitalisasi bisnis UMKM (Dewi, 2021). Dengan penerapan teknologi ini, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform digital. Hal ini sejalan dengan perkembangan tren bisnis modern yang semakin bergantung pada teknologi untuk meningkatkan daya saing di pasar global (Kurniawati et al., 2023).

Dengan berbagai dukungan tersebut, peran pemerintah dalam membantu UMKM kue menjadi sangat krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif (Maulida Sari & Setiyana, 2020). Akses permodalan, pelatihan keterampilan, fasilitasi pasar,

kemudahan regulasi, dan digitalisasi bisnis adalah langkah-langkah nyata yang dapat membantu UMKM kue untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional (Nasional et al., 2022).

Selain itu, pemerintah juga melakukan program pendampingan langsung bagi pelaku UMKM kue, seperti klinik konsultasi bisnis di tingkat kabupaten/kota, pendampingan produksi higienis dan pengemasan menarik melalui Dinas Koperasi dan UMKM, serta bimbingan pemasaran digital yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan marketplace nasional (Wahyudiono et al., 2024). Langkah-langkah nyata ini membantu pelaku usaha tidak hanya memahami teori bisnis, tetapi juga menerapkannya secara langsung di lapangan, sehingga hasilnya lebih.

2. Peluang dan Kelemahan dalam Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM kue di Kota Padangsidimpuan memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu peluang terbesar adalah meningkatnya permintaan terhadap produk kuliner lokal yang memiliki cita rasa khas dan nilai budaya tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui platform daring seperti e-commerce dan media sosial. Dukungan dari program pemerintah, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan pendampingan usaha, juga menjadi peluang strategis yang dapat memperkuat daya saing UMKM (Wijaya, 2013).

Namun, pemberdayaan UMKM kue juga memiliki sejumlah kelemahan internal yang perlu mendapat perhatian. Kelemahan tersebut antara lain rendahnya kemampuan manajerial dan inovasi produk, kurangnya pencatatan keuangan yang rapi, serta minimnya akses terhadap informasi pasar. Di samping itu, masih terdapat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah, yang terkadang membuat pelaku UMKM kurang mandiri dalam mengembangkan usaha. Kelemahan-kelemahan ini dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalankan.

3. Tantangan yang Dihadapi UMKM

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan, UMKM kue masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Banyak pemilik UMKM kue yang masih kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen keuangan, dan

operasional bisnis (Wijaya, 2013). Kurangnya pemahaman mengenai platform e-commerce dan media sosial menyebabkan UMKM kue tidak mampu memaksimalkan potensi pasar yang lebih luas, terutama di era digital saat ini. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, UMKM kue dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka (Bengu et al., 2024).

Selain itu, rendahnya daya saing produk akibat inovasi yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Banyak pelaku UMKM kue yang masih mengandalkan metode produksi tradisional dan belum berani berinovasi dalam menciptakan produk yang lebih menarik dan sesuai dengan tren pasar (Siburian, 2024). Hal ini menyebabkan produk mereka sulit bersaing dengan merek-merek besar atau bahkan dengan UMKM lain yang lebih inovatif. Kurangnya riset pasar dan minimnya akses terhadap informasi mengenai preferensi konsumen juga memperparah situasi ini, sehingga banyak produk UMKM kue kurang diminati oleh konsumen (Septiana et al., 2021).

Tantangan lainnya adalah fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi (Septiana et al., 2021). Harga bahan baku seperti tepung, gula, telur, dan mentega sering mengalami kenaikan yang tidak dapat diprediksi. Ketidakstabilan harga ini membuat pelaku UMKM kue kesulitan dalam menentukan harga jual yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk mereka (Syahputri et al., 2025). Jika harga jual terlalu tinggi, konsumen mungkin beralih ke produk yang lebih murah; namun jika terlalu rendah, pelaku usaha bisa mengalami kerugian.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak pelaku UMKM kue yang belum memiliki izin usaha resmi seperti PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) atau sertifikasi halal (de Galiza Barbosa, 2022). Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan biaya, atau anggapan bahwa legalitas usaha bukanlah hal yang mendesak. Padahal, legalitas usaha sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, termasuk ke ritel modern dan ekspor (Subhan, 2019).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan sektor swasta. Pelaku UMKM harus lebih proaktif dalam meningkatkan literasi digital serta berani berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai tren pasar (Kusmanto et al., 2019). Pemerintah perlu terus memberikan pelatihan dan kemudahan dalam proses perizinan usaha agar lebih banyak UMKM yang memiliki legalitas resmi (Purnawan et al., 2020). Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam memberikan akses bahan baku yang stabil dan terjangkau serta membantu dalam pemasaran produk UMKM. Dengan

kolaborasi yang baik, diharapkan UMKM kue dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis industri kue di Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor UMKM melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan program fasilitasi. Pemerintah berkontribusi dengan memperluas akses pembiayaan yang inklusif, menyediakan pelatihan serta pendampingan secara berkelanjutan, dan mendorong adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk. Selain itu, penyederhanaan regulasi dan kemudahan dalam proses perizinan turut membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adda, H. W., Ibrahim, A. I., Wirastuti, W., Chintya, P., Buntuang, D., Palu, K., Pemerintah, D., & Saing, D. (2024). Peningkatan Kompetensi Pengelola UMKM. *Communnity Development Journal*, 5(5), 8303–8312.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoir, M. (2023). Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 10–20. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302>
- Bengu, H., Kelin, S. P., & Hadjon, R. P. (2024). Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital. *TIMOR CERDAS – Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2(1), 1–7.
- de Galiza Barbosa, dkk. (2022). Genitourinary imaging. In *Clinical PET/MRI* (pp. 289–312). *Jurnal Kommunity Online*, 6 (2) 2025, e-ISSN: 2797-5754

<https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88537-9.00012-X>

- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 276–287. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250/797>
- Hidayah, S. N., & Airawaty, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission di UMK Mamah Dedeh Kitchen dan Zulich Clean And Care. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 776–782. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.1940>
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 70–84. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Journal, C. D., Purwaningsih, N., Gunawan, Y. M., Wiliana, E., Kuningan, K., & Usaha, D. (2025). INOVASI DAN DIGITALISASI USAHA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM. *Community Development*, 6(1), 1523–1528.
- Kharani Putri, O., Zawawi, Z., & Warmana, O. (2024). Pendampingan Pendaftaran NIB Pada UMKM Sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi Lokal Kelurahan Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1006–1013. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2418>
- Kurniawati, M., Riwu, Y. F., Amtiran, P. Y., & Fa'ah, Y. S. (2023). Pelatihan Personal Branding Dan Digital Literacy Bagi Pelaku Umkm Di Kota Kupang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1399. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i2.14270>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Maimuna, F. F., Alda, N., Roroa, F., & Agit, A. (2024). Transformasi Digital dalam Kewirausahaan : Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Simetris*, 2(x), 109.
- Maulida Sari, C. D., & Setiyana, R. (2020). Sosialisasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v2i1.2050>

- Nanta, B. M., Tanjung, H. Y., Parlindungan, M. A., Saragih, M. A., Tanjung, R. R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., Mikro, U., Ekonomi, P., Usaha, P., & Mikro, U. (2025). *Analisis Perkembangan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. 10(204), 158–169.
- Nasional, T., Riset, K. M., Luhung -, B., & Sukresna, M. (2022). Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM SHIBIRU. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 14(1), 111–123. <http://jdm.unnes.ac.id>
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative: Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- R, E. K., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Septiana, R., Alfath, R., Putra, A., & Hendra, J. (2021). Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi Strategi Optimalisasinya di Perusahaan Manufaktur. *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, 7(6), 51–56.
- Siburian, B. (2024). Pengaruh Pengembangan Produk, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 207–215.

- Siska, E. (2017). *Mendongkrak Kinerja UMKM : Peran Financial Literacy , Credit Scoring , dan Kebijakan Pemerintah*. PT. Kimshafi Alung Cipta.
- Subhan, M. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital Umkm Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Supriatna, D., Candra, E., Adinugroho, I., Nasution, M. A., & Yanti, N. (2023). Pengaruh Kinerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(02), 43–53. <https://doi.org/10.58812/sek.v1i02.88>
- Syahputri, E. O., Sihombing, S. B., Mariana, M., Bisnis, J., & Lhokseumawe, P. N. (2025). *Pengendalian Biaya Produksi dalam Manufaktur : Teknik dan Tantangan*. 4(1), 30–41.
- Wahyudiono, A., Waluyo, B. L., Firman, H., & Saputra, A. (2024). Pengabdian Masyarakat IPM : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat. *IPM : Jurnal Inovasi*, 1(2), 73–79.
- Wijaya, R. (2013). Strategi Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada Era Global. *Calyptra*, 2(2), 1–12.